

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI GENERASI MILENIAL DI DESA MEHANGGIN
KECAMATAN MUARADUA KABUPATEN OKU SELATAN**

***THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN INCREASING MILLENNIAL
GENERATION PARTICIPATION IN MEHANGGIN VILLAGE, MUARADUA
DISTRICT, SOUTH OKU REGENCY***

Miki Yuniper^{1*}, Maria Ekowati²

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka

² IPDN

¹myuniper023@gmail.com, ^{2*}maria_ekowati@ipdn.ac.id

Abstrak

Memasuki era Revolusi Industri 4.0, tantangan modernisasi menuntut kesiapan sumber daya manusia, di mana generasi milenial memegang peran krusial sebagai pilar kepemimpinan masa depan. Namun, keterlibatan pemuda dalam pembangunan di tingkat lokal sering kali belum optimal akibat pendekatan yang kurang partisipatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi generasi milenial. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran Pemerintah Desa Mehanggin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan dalam meningkatkan partisipasi generasi milenial. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan kepala desa, perangkat desa, dan tokoh pemuda setempat, serta didukung oleh observasi langsung dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk menggambarkan kondisi riil di lapangan secara objektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi generasi milenial desa Mehanggin sudah mulai berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Pendekatan partisipatif yang diterapkan mampu meningkatkan rasa percaya diri dan kreativitas pemuda, meski tingkat partisipasi aktif milenial dalam desa masih fluktuatif. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kurangnya komunikasi intensif antara pemerintah desa dan pemuda, keterbatasan wadah atau program pemberdayaan yang inovatif, serta minimnya alokasi anggaran khusus untuk pengembangan kapasitas generasi muda. Adapun yang diperlukan peningkatan profesionalisme dalam menciptakan iklim yang lebih kondusif dan responsif terhadap potensi milenial desa.

Kata Kunci: Tata Kelola Desa, Partisipasi Masyarakat, Hambatan Pembangunan

Abstract

Entering the Industrial Revolution 4.0 era, the challenges of modernization demand the readiness of human resources, where the millennial generation plays a crucial role as the pillar of future leadership. However, youth involvement in local-level development is often not optimal due to a less participatory approach. The research problem in this study is how the village government roles in increasing the participation of the millennial generation. Meanwhile, this study aims to determine and analyze the role of the Mehanggin Village Government, Muaradua District, South OKU Regency, in increasing the participation of the millennial generation. This study employed a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection was conducted through in-depth interviews with the village head, village officials, and local youth leaders, supported by direct observation and documentation studies. Data analysis was carried out through several stages, including data reduction, data presentation, and conclusion drawing, to objectively depict the real conditions in the field. The results showed that the role of the Village Government in increasing the participation of the millennial generation in Mehanggin Village has begun to take place, but it is not yet fully effective. The participatory approach implemented was able to increase the confidence and creativity of the youth, although the active participation rate of millennials in the village remains fluctuated. The main obstacles found include a lack of intensive communication between the village government and the youth, the limited availability of innovative empowerment forums or programs, and the minimal allocation of a specific budget for youth capacity development. Thus, an increase in

professionalism is required to create a more conducive and responsive environment toward the potential of village millennials.

Keywords: *Village Governance, Community Participation, Development Obstacles*

PENDAHULUAN

Kelompok milenial kini menempati posisi strategis dalam pandangan publik maupun instansi pemerintah sebagai pilar utama penggerak pembangunan nasional sekaligus suksesor kepemimpinan di masa depan. Dinamika Revolusi Industri 4.0 membawa konsekuensi modernisasi yang menuntut Indonesia untuk bertransformasi; dari yang semula berbasis sosio-agraris menjadi masyarakat yang melek teknologi informasi. Dalam situasi ini, potensi besar yang dimiliki generasi muda harus dioptimalkan agar menjadi modal sosial yang tangguh dalam menyaring serta menghadapi gempuran globalisasi.¹

Pada tataran lokal, otoritas desa memegang peran yang sangat krusial berkat kedekatan sosiologisnya dengan warga, di samping tanggung jawabnya sebagai fasilitator dan pelindung masyarakat. Efektivitas pengembangan potensi pemuda ini akan tercapai melalui metode partisipatif—sebuah pola pembinaan yang menempatkan generasi muda sebagai subjek aktif dalam program pembangunan. Pelibatan ini diproyeksikan mampu memupuk rasa percaya diri mereka, yang pada gilirannya akan menstimulasi munculnya inisiatif, kreativitas, serta kapabilitas diri.²

Intervensi pemerintah desa dalam memotivasi keterlibatan ini merupakan manifestasi nyata dari fungsinya sebagai aparatur negara yang mengayomi rakyat. Di sinilah posisi ideal ditempatkan: generasi muda berperan selaku motor penggerak (aktor utama) pembangunan di desa, sedangkan jajaran pamong desa bertanggung jawab memberikan supervisi, arahan, serta memfasilitasi iklim yang kondusif bagi produktivitas kegiatan pemuda tersebut.³

Menyikapi situasi tersebut, aparatur desa didesak untuk terus mengoptimalkan performa kerja mereka serta merancang strategi cerdas dalam membangun ekosistem yang suportif. Langkah ini penting agar seluruh modal pembangunan dapat mengakselerasi lahirnya pemuda milenial yang berdaya, mandiri, dan mapan secara sosial-ekonomi. Harmonisasi program kerja pemerintah daerah dan desa harus saling berkesinambungan serta saling melengkapi guna mewujudkan target pembangunan nasional. Lingkungan yang progresif tersebut hanya akan tercipta apabila jajaran pamong desa memiliki profesionalisme tinggi serta dedikasi penuh dalam memacu keterlibatan generasi milenial.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah, bagaimana peran pemerintah desa mehanggin dalam meningkatkan partisipasi generasi millennial. Faktor penghambat serta Upaya mengatasi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi generasi millennial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah Desa mehanggin dalam meningkatkan partisipasi generasi millennial. Faktor penghambat serta Upaya mengatasi pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi generasi millennial.

Teori yang digunakan dalam proses wawancara adalah teori kualitatif. Teori

¹ Muhammad Ridwan, "Tantangan Demografi dan Peran Generasi Milenial di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan Daerah* 8, No. 1 (2021): hlm. 45.

² *Ibid.*, hlm. 48.

³ Eko Prasetyo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Partisipasi Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 112.

kualitatif adalah kerangka konseptual yang memandang wawancara bukan sekadar proses tanya jawab mekanis, melainkan sebuah interaksi sosial yang dinamis untuk menggali konstruksi makna, pengalaman, dan pandangan hidup informan secara mendalam.

Peran teori kualitatif dalam wawancara sebagai lensa konseptual dan kompas pengendali yang memastikan seluruh proses penggalan data berjalan secara terarah, mendalam, dan bernilai ilmiah. Tanpa adanya landasan teori, proses wawancara berisiko kehilangan fokus, menghasilkan data yang dangkal, atau melebar ke percakapan yang tidak relevan dengan substansi penelitian. Teori berfungsi membatasi ruang lingkup pencarian informasi dengan cara menetapkan indikator-indikator penting yang wajib ditanyakan kepada informan. Melalui peran ini, peneliti dapat dengan mudah menerjemahkan konsep akademik yang rumit menjadi daftar pertanyaan konkret sehari-hari yang mudah dipahami oleh aparatur desa maupun generasi milenial di Desa Mehanggin.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena bersifat partisipatif, sehingga memungkinkan peneliti untuk beradaptasi langsung dengan kondisi riil di lapangan guna menggambarkan fenomena secara mendalam. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi secara komprehensif bagaimana dinamika interaksi dan peran nyata yang dimainkan oleh aparatur desa terhadap pemuda setempat.

Penelitian ini berlokasi di Desa Mehanggin, Kecamatan Muaradua, Kabupaten OKU Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan untuk memperoleh gambaran yang objektif, kontekstual, dan sistematis mengenai optimalisasi peran aparatur desa dalam merangkul serta menggerakkan potensi generasi milenial di wilayah tersebut.

Penentuan informan dalam penelitian kualitatif ini didasarkan pada asas kemanfaatan dan penguasaan informasi terkait topik penelitian. Adapun informan atau narasumber yang dilibatkan meliputi: 1) Kepala Desa beserta jajaran perangkat Desa Mehanggin; 2) Pengurus dan anggota organisasi kepemudaan, yaitu Karang Taruna dan Remaja Masjid Desa Mehanggin; 3) Tokoh masyarakat yang memahami dinamika sosial dan kepemudaan di Desa Mehanggin.

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan dengan fokus penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari: a) Wawancara (*Interview*): Dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan panduan instrumen pertanyaan terstruktur kepada para informan guna menggali informasi mengenai peran aparatur desa serta hambatan dalam meningkatkan partisipasi milenial; b) Dokumentasi: Dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa profil desa, struktur organisasi, dokumen program kerja pembangunan desa, serta foto- foto kegiatan yang melibatkan generasi milenial di Desa Mehanggin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Otoritas Desa Mehanggin dalam Memacu Keterlibatan Pemuda Milenial

Merujuk pada hasil telaah mengenai sistem tata kelola tata pamong serta program penguatan komunitas di Desa Mehanggin, fungsi dan intervensi jajaran aparatur desa dalam merangkul kelompok muda potensial demi kemajuan wilayah tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam empat pilar kontribusi, antara lain: Peran sebagai Fasilitator (Penyedia Wadah Kegiatan) Pemerintah Desa Mehanggin bertindak

sebagai fasilitator dengan menghidupkan dan mendukung secara struktural organisasi kepemudaan, utamanya Karang Taruna. Realisasi pemerintah desa memfasilitasi legalitas kepengurusan, menyediakan ruang pertemuan, dan memberikan stimulus berupa sarana olahraga atau kesenian.

Dampak dengan adanya wadah yang difasilitasi resmi oleh desa, para milenial yang memiliki potensi kepemimpinan dan kreativitas mempunyai panggung legal untuk mengorganisir kegiatan kemasyarakatan, seperti kegiatan kepemudaan, peringatan hari besar, hingga turnamen olahraga lokal.

Peran sebagai Edukator (Peningkatan Kapasitas / Skill), Untuk mengoptimalkan potensi milenial agar mampu memberdayakan desa, pemerintah desa memposisikan diri sebagai penyedia edukasi. Realisasi : Mengalokasikan sebagian program kerja untuk pelatihan-pelatihan yang relevan dengan perkembangan zaman. Contohnya adalah pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal, pengenalan pertanian modern bagi pemuda, serta pelatihan dasar teknologi informasi untuk mendukung administrasi desa. Dampak : Peran ini mengubah milenial dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek yang memiliki keahlian (skill) untuk membuka peluang usaha mandiri di desa.

Peran sebagai Motivator dan Katalisator Smart Village : Pemerintah desa mendorong milenial untuk melek digital dan memimpin adaptasi teknologi di tingkat desa. Realisasi: Pemerintah desa memberikan kepercayaan kepada pemuda yang menguasai teknologi informasi untuk ikut serta mengelola Sistem Informasi Desa (SID), pemutakhiran data digital, atau mengelola akun media sosial resmi desa sebagai sarana promosi potensi wilayah. Dampak: Keterlibatan ini memicu motivasi milenial bahwa kemampuan digital mereka sangat dihargai dan dibutuhkan untuk memajukan birokrasi serta pelayanan publik di Desa Mehanggin.

Peran Integrator dalam Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) Pemerintah desa mulai mengintegrasikan suara pemuda ke dalam sistem regulasi penentuan kebijakan desa.

Realisasi, Melibatkan perwakilan pemuda secara aktif dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Dampak, Suara, ide kreatif, dan kebutuhan spesifik generasi muda tidak lagi diabaikan, melainkan diakomodasi untuk dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes).

Faktor Penghambat Serta Upaya Mengatasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi Millennial. Berikut adalah Faktor Penghambat Mengatasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi Millennial, Tingginya Arus Urbanisasi (Merantau) Banyak pemuda produktif dan berpendidikan tinggi asal Desa Mehanggin memilih keluar daerah (merantau ke kota besar) setelah menyelesaikan studi mereka. Hal ini menyebabkan desa kehilangan kader-kader milenial potensial (*brain drain*).

Apatisme dan Krisis Kepercayaan (*Sense of Belonging*) Sebagian generasi milenial masih memiliki pandangan apatis. Mereka menganggap bahwa urusan pemerintahan desa adalah urusan yang kaku, membosankan, dan hanya milik golongan tua (perangkat desa).

Keterbatasan dan Dominasi Anggaran Fisik Secara historis, Alokasi Dana Desa (DD) cenderung terserap habis untuk pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan desa, siring, atau gedung. Akibatnya, anggaran khusus untuk pemberdayaan kapasitas pemuda menjadi sangat minim.

Kesenjangan Pola Komunikasi dan Informasi Informasi mengenai program-program desa sering kali tidak sampai ke telinga generasi milenial karena saluran

informasi yang digunakan masih bersifat konvensional (papan pengumuman fisik atau surat edaran).

Upaya Mengatasi Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Generasi Millennial

Untuk mengatasi berbagai hambatan di atas, berikut adalah langkah- langkah strategis yang diterapkan oleh pemerintah desa, Optimalisasi Unit Usaha BUMDes Menciptakan stimulus ekonomi lokal dengan merancang unit usaha yang relevan dengan anak muda. Contohnya seperti pengelolaan potensi wisata desa, kemitraan UMKM berbasis digital, hingga penyediaan unit jasa pengetikan, *printing*, atau loket pembayaran digital yang dikelola langsung oleh pemuda setempat. Tujuannya untuk membuktikan bahwa desa mampu memberikan ruang penghasilan yang menjanjikan.

Pendekatan Persuasif Informal (Kultural) Meruntuhkan sekat birokrasi dengan mendekati pemuda lewat ruang-ruang santai, seperti diskusi di warung kopi, menghadiri perkumpulan olahraga, atau mengadakan forum dengar pendapat (*sharing session*) yang kasual. Hal ini membuat pemuda merasa didengar sebagai teman dialog, bukan sebagai bawahan.

Refokusing Anggaran secara Bertahap & Kemitraan Melalui kesepakatan dalam Musrenbangdes, pemerintah desa berkomitmen mengunci persentase tertentu dari Anggaran Desa khusus untuk pos pemberdayaan kepemudaan secara konsisten setiap tahunnya. Selain itu, desa juga membangun jejaring kemitraan dengan Dispora atau Dinas PMD Kabupaten OKU Selatan untuk mendapatkan bantuan program pelatihan tanpa membebani kas desa sepenuhnya.

Digitalisasi Saluran Informasi Desa Aktif memanfaatkan media sosial (seperti Facebook grup, Instagram, atau grup WhatsApp koordinasi) untuk mempublikasikan transparansi anggaran, lowongan kegiatan, maupun program pemberdayaan. Gaya penyampaiannya pun dibuat lebih visual dan menarik agar sesuai dengan preferensi konsumsi informasi generasi milenial.

KESIMPULAN

1. Keterlibatan Pemerintah Desa Mehanggin dalam menstimulasi peran aktif kelompok pemuda diwujudkan melalui empat fungsi pokok, yakni sebagai fasilitator, edukator, motivator, serta integrator. Pihak pemerintah desa telah menyediakan sarana kegiatan kepemudaan lewat optimalisasi Karang Taruna, menyelenggarakan program pelatihan demi mengasah kompetensi generasi milenial, mendorong integrasi teknologi digital dalam sistem pelayanan publik desa, serta menyertakan elemen pemuda ke dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Berbagai langkah ini telah membuka kesempatan bagi generasi muda untuk andil dalam program kemajuan daerah, kendati implementasinya masih memerlukan penyempurnaan di beberapa lini.
2. Kendala yang dihadapi oleh pamong Desa Mehanggin dalam mendongkrak keaktifan pemuda milenial di antaranya dipengaruhi oleh tingginya laju urbanisasi atau tradisi merantau yang berdampak pada menyusutnya kuantitas pemuda potensial di wilayah lokal, timbulnya sikap masa bodoh (*apatis*), serta minimnya rasa memiliki terhadap pembangunan desa, keterbatasan anggaran pemberdayaan pemuda karena dominasi pembangunan fisik, serta kesenjangan komunikasi akibat penggunaan saluran informasi yang masih konvensional. Faktor-faktor tersebut menjadi kendala utama untuk mendongkrak peran aktif kelompok usia muda secara aktif dalam pembangunan desa.
3. Upaya Pemerintah Desa Mehanggin dalam mengatasi hambatan dan meningkatkan partisipasi generasi milenial dilakukan melalui optimalisasi unit usaha BUMDes yang

melibatkan pemuda, penerapan pendekatan persuasif dan kultural untuk membangun kedekatan dengan generasi muda, pengalokasian anggaran pemberdayaan kepemudaan secara bertahap melalui kemitraan dengan berbagai pihak, serta digitalisasi saluran informasi desa melalui media sosial. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat, keterlibatan, dan kontribusi generasi milenial dalam pembangunan serta kemajuan Desa Mehanggin.

SARAN

Pemerintah Desa Mehanggin untuk terus menjaga konsistensi alokasi anggaran pemberdayaan kepemudaan secara reguler setiap tahun serta mengembangkan pengelolaan BUMDes berbasis digital secara profesional bersama pemuda setempat guna menekan laju urbanisasi. Selain itu, digitalisasi saluran informasi desa perlu dipertahankan dan dikelola secara berkelanjutan agar komunikasi dua arah dengan generasi millennial tetap berjalan interaktif.

Pemerintah Desa Mehanggin disarankan segera menyusun Peraturan Desa (Perdes) khusus kepemudaan untuk memberikan legalitas hukum dan menjamin alokasi anggaran APBDes yang proporsional di luar infrastruktur fisik. Selain itu, tata kelola forum formal seperti Musrenbangdes perlu direvitalisasi secara demokratis untuk mengikis sekat senioritas, didukung pemanfaatan media sosial sebagai sarana sosialisasi yang inklusif.

Untuk menekan arus urbanisasi milenial keluar dari Kecamatan Muaradua, Pemerintah desa harus merestrukturisasi Karang Taruna melalui inkubasi program ekonomi kreatif lokal dan digitalisasi UMKM. Langkah strategis ini bertujuan untuk melahirkan serta mempertahankan aktor penggerak (*local champion*) yang adaptif demi membangun partisipasi desa yang berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Prasetyo, *Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Partisipasi Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 112
- Hanif, Nurcholis. (2016). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Hikmat, Harry. (2015). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press. (*Sangat relevan untuk landasan teori cara aparaturnya memberdayakan milenial*).
- Karsidi, Ravik. (2018). *Sosiologi Pendidikan dan Sosiologi Pembangunan: Perspektif Pemberdayaan Pemuda*. Surakarta: UNS Press. (*Berguna membedakan karakteristik sosial pemuda di pedesaan*).
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Thousand Oaks: SAGE Publications. (*Buku wajib untuk metodologi wawancara kualitatif skripsi Anda*).
- Muhammad Ridwan, "Tantangan Demografi dan Peran Generasi Milenial di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan Daerah* 8, No. 1 (2021): hlm. 45.
- Nawawi, Ismail. (2016). *Pembangunan Desa & Kawasan: Konsep, Kebijakan, dan Strategi*. Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Ndraha, Taliziduhu. (2016). *Kubu: Pemerintahan Desa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sadu Wasistiono. (2016). *Kapasitas Pemerintah Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Soleh, A. (2020). *Strategi pemberdayaan masyarakat desa berbasis potensi lokal*. Yogyakarta: Deepublish.

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. (Sangat penting untuk penguat Bab 3 metode penelitian wawancara).
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (2017). *Perencanaan Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: Haji Masagung. (Teori dasar mengenai tangga partisipasi masyarakat dalam forum formal desa).
- Widodo, Joko. (2016). *Good Governance: Telaah Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ariani, N., & Rahman, A. (2021). Hambatan Komunikasi Antargenerasi antara Pemerintah Desa dan Pemuda dalam Perencanaan Pembangunan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145-158.
- Gani, R., Paramata, D. Y., & Paramata, S. H. (2016). Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Partisipatif. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Prastowo, A. (2016). Strategi Komunikasi Pemerintah Desa dalam Menggerakkan Partisipasi Generasi Muda. *Jurnal Masyarakat dan Pemerintahan*. Universitas Brawijaya.
- Pratama, M. R., & Saputra, H. (2022). Revitalisasi Karang Taruna Berbasis Ekonomi Kreatif: Solusi Menekan Arus Urbanisasi Pemuda Desa. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 89-102.
- Setiawan, B. (2020). Akuntabilitas Dana Desa dalam Fasilitasi Program Inovasi Kepemudaan Generasi Milenial. *Jurnal Tata Kelola Pemerintahan*, 8(3), 210-225.
- Utami, S. D., dkk. (2023). Pemanfaatan Media Sosial oleh Aparatur Pemerintahan Desa sebagai Ruang Komunikasi Inklusif bagi Generasi Z dan Milenial. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 21(1), 34-48.
- Wahyudi, T. (2019). Tingkat Partisipasi Politik dan Sosial Generasi Milenial Pedesaan dalam Forum Musrenbangdes. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 6(2), 112-127.
- Wulandari, R. (2016). Peran Kepala Desa sebagai Inovator dan Motivator dalam Pembangunan Desa berbasis Kepemudaan. *Jurnal Governansi*. Universitas Tanjungpura.